

Analisis Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta

Mitra Permatasari¹ T Heru Nurgiansah² Aim Abdulkarim³ Suriaman⁴ Ryan Prayogi⁵
Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,
Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4,5}
Email: mitrapermatasari@upi.edu¹ th3ru@upi.edu² aimabdulkarim@upi.edu³
suriamanagus1990@upi.edu⁴ ryan.prayogi@upi.edu⁵

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis penerapan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Penulisan ini menggunakan pendekatan Literatur Review dengan sumber data dari beberapa artikel ilmiah dan menggunakan analisis SWOT yang menganalisis tentang Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*). Hasil analisis menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta telah dilaksanakan berdasarkan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, outcome, kesepakatan konsorsium dan juga visi misi dari Universitas.

Kata Kunci: Kurikulum, Pendidikan Kewarganegaraan, Merdeka Belajar-Kurikulum Merdeka.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam proses pendidikan (Afrizal & Najicha, 2022). Kualitas kurikulum akan menentukan kompetensi lulusan (Arizka, 2020). Keberadaan kurikulum memerlukan rancangan (Bahrudin, 2019). Pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pengguna lulusan (Balogun & Yusuf, 2019). Saat ini perkembangan IPTEKS berlangsung sangat cepat mengikuti pola yang sulit diprediksi. SN-Dikti telah berusaha mengadakan berbagai perubahan dan mengeluarkan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 yang mengimplementasikan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

Proram Studi PPKn FKIP Universitas PGRI Yogyakarta memiliki komitmen untuk mengimplementasikan Kurikulum yang memfasilitasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan mengadakan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, outcome, kesepakatan konsorsium dan juga visi misi dari Universitas. Perubahan kurikulum merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap pendidikan kebutuhan masyarakat, serta kebutuhan pengguna lulusan (Bergersen & Muleya, 2019). Kurikulum Program Studi PPKn dibuat berdasarkan pentahapan pembuatan. Kurikulum ini mengadaptasi kebijakan memfasilitasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, core dari pembelajaran di Prodi PPKn, serta berbagai kesepakatan dari konsorsium dan penciri prodi. Analisis kurikulum harus dilandasi oleh kebutuhan pembelajaran di SMP dan SMA, dunia kerja serta berbagai kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa di masa mendatang (Bessant et al., 2016).

Perancangan kurikulum dibuat secara bertahap dan terencana melalui evaluasi diri program studi, pengkaji kebijakan pemerintah, mengumpulkan masukan dari stakeholder, pembuatan learning outcomes yang disesuaikan dengan Dikti, Konsorsium dan Penciri Prodi,

mengadakan kerjasama dengan mitra, pembuatan kurikulum yang memfasilitasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta evaluasi kurikulum. Proses tersebut dilaksanakan secara terperinci untuk menciptakan kurikulum yang tepat dengan learning outcomes dan memfasilitasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sejumlah penyesuaian kurikulum tidak hanya pada cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran tetapi juga pada tujuan, isi dan bahan pembelajaran (Campbell, 2019). Keduanya dilakukan ruang lingkup kurikulum pendidikan untuk kondisi khusus. Implementasi kurikulum pada satuan pendidikan pada kondisi khusus dewasa ini dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Dewi et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Penyusunan Kurikulum MBKM

Kebijakan tentang Kurikulum Program Studi mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta peraturan pendukungnya dalam mengembangkan kurikulum. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tahun 2000, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang SNPT, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Asosiasi PPKn Se Indonesia tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi PPKn. Sedangkan kebijakan internal meliputi: Keputusan Rektor Nomor 017/SK/Rektor-UPY/III/2014 tentang Pola Ilmiah Pokok dan Penciri Pendidikan UPY, Perpedoman pada Pedoman Akademik Universitas PGRI Yogyakarta tahun akademik 2020/2021 yang dibuat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 101.1/SK/REKTOR-UPY/XII/2017, dan pedoman suasana akademik, yaitu SK Rektor nomor: 061/SK/Rektor-UPY/VIII/2017. Secara rinci, kebijakan penyusunan kurikulum di UPPROGRAM STUDI dan Prodi PPKN berpedoman pada:

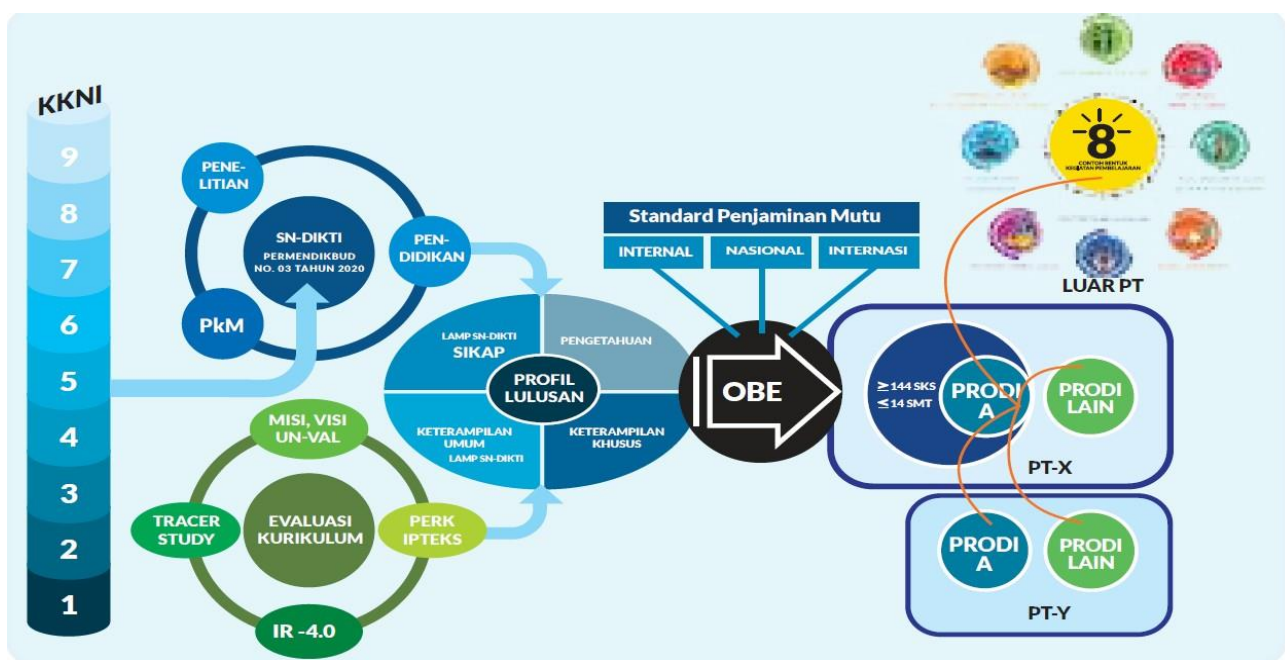
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi,
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi,
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/U/202 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi,
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 017/SK/Rektor-UPY/III/2014 tentang Pola Ilmiah Pokok dan penciri pendidikan,
9. Surat Keputusan Rektor Nomor :031.2/SK/Rektor-UPY/III/2018 tentang pedoman penyusunan, memonitoring dan evaluasi peninjauan kurikulum Universitas PGRI Yogyakarta (2018),

10. Pedoman Akademik Universitas PGRI Yogyakarta tahun akademik 2017/2018 yang dibuat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 101.1/SK/REKTORUPY/XII/2017.
11. Surat Keputusan Rektor Nomor: 061/SK/RektorUPY/VIII/2017 menjelaskan kebijakan dan dukungan institusi untuk menjamin terciptanya suasana akademik.

Pada tahun ajaran 2020-2021 Program Studi PPKn telah merancang Kurikulum yang Memfasilitasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mengatur tentang perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan perbaikan kurikulum PROGRAM STUDI

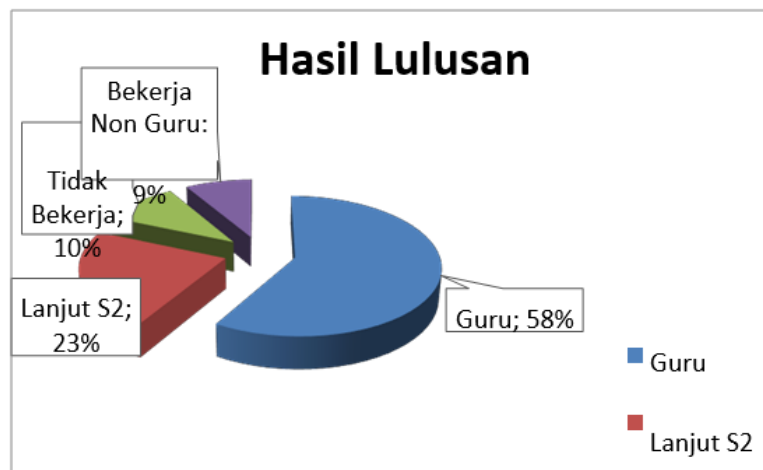
Penyusunan Kurikulum MBKM

Proses penyusunan kurikulum yang memfasilitasi Merdeka Belajar Kampus merdeka dilaksanakan dengan berbagai pentahapan. Tahapan tersebut antara lain:



Gambar 1. Alur Pengembangan Kurikulum Memfasilitasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka

1. Menganalisis Kurikulum tingkat Prodi. Analisis kurikulum Program Studi didasari oleh berbagai hal, terutama kebijakan pemerintah tentang KKNi, arah kebijakan Tridharma Perguruan Tinggi, serta yang tidak kalah pentingnya adalah evaluasi kurikulum Program Studi (Gladu, 2013). Pada evaluasi Program Studi dilaksanakan dengan mengadakan rapat interen untuk membahas tentang perkembangan IPTEKS yang mempengaruhi penyelenggaraan pembelajaran, perkembangan revolusi industri 4,0, penyesuaian dengan visi misi fakultas dan universitas, serta mengadakan treasure study. Masukan-masukan dari stake holder menjadi suatu kajian untuk dapat menentukan learning outcomes (Kaumba et al., 2020).
2. Treacer Study. Tracer Study merupakan sebuah langkah untuk melacak jejak alumni sehingga mengetahui resapan alumni di dunia kerja (Komara, 2017). Tracer Study merupakan penelitian mengenai situasi alumni khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja, dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama perkuliahan (Masnun & Pratama, 2020). Pelacakan jejak alumni adalah studi utama yang telah dilaksanakan secara sistematis, institusional, dan terus menerus untuk mengetahui tingkat keberhasilan lulusan (Mofoluwawo, 2018). Berikut hasil lulusan Prodi PPKn UPY.



Gambar 2. Hasil Treacer Study Lulusan PPKn UPY

Berdasarkan hasil treaser study, lulusan Prodi PPKn FKIP Universitas PGRI Yogyakarta sebanyak 58% bekerja sebagai guru, melanjutkan kuliah S2 sebanyak 23%, bekerja sebagai wirausaha sebanyak 9% dan menjadi ibu rumah tangga sebanyak 10%. Hasil dari treaser study tersebut menjadi masukan bahan perubahan kurikulum.

3. Forum Discussion Grup dengan Stake Holder. FGD dengan stake holder melibatkan mahasiswa, dosen, alumni, pengguna, mitra, serta berbagai pihak yang berhubungan dengan output Prodi PPKn FKIP Universitas PGRI Yogyakarta. Forum Discussion Grup bertujuan untuk meminta masukan para stake holder tentang kurikulum yang telah dijalankan sebelumnya (Muleya, 2018). Masukan-masukan dari alumni tentang berbagai hal yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran merupakan salah satu point penting dalam mengembangkan kurikulum (Mutale Mulenga & Ng'andu, 2022). Mitra dan pengguna juga memberikan masukan tentang berbagai hal yang perlu ditingkatkan dengan berdasarkan pada praktek di lapangan (Nanggala & Suryadi, 2020). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini juga menjadi dasar untuk peningkatan kualitas pembelajaran (Nugraha, 2021). Mitra dari universitas lain, dapat memberikan masukan tentang hasil kesepakatan konsorsium tentang berbagai kebijakan bersama yang diambil untuk dapat memberikan standarisasi mata kuliah yang wajib dan mata kuliah yang didasarkan pada penciri perguruan tinggi (Nurdin, 2016).



Gambar 3. Proses Pertemuan dengan Stake Holder

4. Penyusunan Kurikulum. Berdasarkan pada masukan dari berbagai elemen stake holder maka diadakan penyusunan kurikulum yang dapat memfasilitasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Penyusunan kurikulum harus dilandasi juga dengan berbagai kebijakan pemerintah, konsorsium, serta penciri Program Studi (Nurdin, 2015). Penyusunan kurikulum dimulai dengan menganalisis *body of knowledge* Prodi PPKn, pembuatan Capaian Pembelajaran Program Studi, menganalisis keterkaitan dengan 4 pilar Unesco, Bahan Kajian, Matrik Kurikulum, pembagian mata kuliah, bobot mata kuliah, sajian mata kuliah, dan *softskill* (Raharjo, 2020).
5. Review Kurikulum. Review kurikulum dilaksanakan secara berjenjang (Santoso, 2021a). Review harus dilaksanakan dan melibatkan Lembaga Pengembangan Pendidikan (Rachman, Nurgiansah, et al., 2021). Review tersebut meliputi keseluruhan dokumen kurikulum yang telah dikirimkan, setelah melalui beberapa kali revisi, kemudian disampaikan kepada Senat di Fakultas untuk dapat diajukan untuk disahkan di tingkat Senat Universitas.

Pelaksanaan Kurikulum

1. Penyediaan Pakar yang Relevan. Pada penyusunan kurikulum pada tahun 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melaksanakan peninjauan kurikulum secara serentak berdasarkan pada Surat Keputusan Rektor UPY Nomor: 048/SK/REKTOR-UPY/V/2018 tentang Tim Peninjauan Kurikulum. Tim terdiri atas tim universitas, fakultas, dan program studi. Tim Kurikulum universitas bertugas untuk mengontrol keseluruhan proses peninjauan kurikulum tingkat Universitas. Selanjutnya, tim kurikulum fakultas mengontrol kegiatan penyusunan tingkat fakultas, terkait dengan mata kuliah fakultas. Peninjauan kurikulum di FKIP diawali dengan workshop penetapan capaian pembelajaran lulusan (*learning outcome*) pada tanggal 9 April 2018 yang dilaksanakan oleh LPP UPY, yang dihadiri oleh semua tim kurikulum dari program studi.

Pada kegiatan ini juga dilaksanakan *klinis-review* kurikulum program studi masing-masing. Hasil dari workshop ini adalah:

- a. Capaian pembelajaran atau perilaku kurikulumprodi di UPY telah sesuai dengan SN Dikti untuk level sarjana,
- b. Capaian pembelajaran keterampilan umum kurikulum semua prodi di UPY telah sesuai dengan SN Dikti,
- c. Capaian pembelajaran pengetahuan dan keterampilan khusus kurikulum semua prodi di UPY telah sesuai dengan capaian pembelajaran asosiasi,
- d. Capaian pembelajaran kurikulum semua prodi di UPY telah sesuai dengan level 6 KKNI dan menentukan mata kuliah penciri prodi.

Selanjutnya, setelah workshop penetapan capaian pembelajaran LPP UPY melanjutkan dengan workshop penyusunan matrik pemetaan mata kuliah dan struktur kurikulum program studi. Upaya penyempurnaan proses peninjauan kurikulum di FKIP dilakukan dengan mengadakan peninjauan mata kuliah fakultas dan peninjauan kurikulum prodi yang melibatkan stakeholder (Santoso, 2020).

2. Pemberian Asistensi. Asistensi dalam mengembangkan kurikulum dilakukan dengan koordinasi antara Lembaga Pengembangan Pendidikan dan UPPS dengan mengadakan workshop penyusunan matrik pemetaan mata kuliah.

Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum

Tabel 1. Analisis SWOT

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas PGRI Yogyakarta mempunyai komitmen dalam pengembangan kurikulum di berbagai jenjang 2. Universitas PGRI senantiasa mengupdate kebijakan kurikulum terbaru sehingga Program Studi dapat menyesuaikan diri dengan kurikulum baru 3. Program Studi mempunyai komitmen untuk menyesuaikan kurikulum dengan prosedur yang standar 4. Program Studi pernah memperoleh hibah Kurikulum sehingga memahami tentang pentingnya perubahan kurikulum 5. Dosen PPKn menjabat di Lembaga Pengembangan Pendidikan sehingga mempunyai kompetensi untuk mengembangkan kurikulum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guna peningkatan implementasi mata kuliah beberapa mata kuliah diperlukan peralatan dan ruang yang representatif agar hasilnya maksimal. 2. Perlu pendanaan dalam jumlah besar untuk mengembangkan kurikulum dengan kualitas tinggi. 3. Perlu adanya peningkatan kerjasama yang lebih luas dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi.
Peluang	Tantangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi merupakan anggota Konsorsium Program Studi tingkat Nasional sehingga mudah untuk mengadakan koordinasi dan kerjasama. 2. Program Studi mempunyai peluang untuk mengembangkan kurikulum secara maksimal berdasarkan kompetensi atas bimbingan LPP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu mengembangkan kurikulum yang berwawasan internasional 2. Kurikulum mempunyai karakteristik yang sangat kuat sebagai penciri Program Studi

Pembahasan Hasil Analisis SWOT:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi untuk mewujudkan terciptanya tata kelola Program Studi yang baik harus dilakukan (Santoso, 2021b).
2. Mengoptimalkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan peningkatan strategi pendidikan dan kerjasama antar perguruan tinggi khususnya pelaksanaan Tridarma (Santoso et al., 2023).
3. Mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki Program Studi PPKn untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan stakeholder.
4. Meningkatkan efektivitas dan produktivitas kegiatan kemahasiswaan sebagai wahana untuk menyiapkan calon pemimpin dimasa yang akan datang.
5. Mengembangkan kapasitas sumberdaya Program Studi melalui pengoptimalan kerjasama antar universitas dan kelembagaan.
6. Meningkatkan *brand image* Program Studi PPKn pada skala Nasional dan Internasional.
7. Memfasilitasi peningkatan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa sehingga dapat meningkatkan klusterisasi perguruan tinggi (Suwardi, 2022).
8. Meningkatkan kualifikasi akademik Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui studi lanjut dan peningkatan jabatan akademik/pangkat.
9. Meningkatkan kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam penguasaan ICT dan bahasa Inggris.
10. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta partisipasi dalam berbagai forum ilmiah agar meningkatkan pengalaman dan pemahaman mahasiswa dalam aspek praktis (Rachman, Ryan, et al., 2021).
11. Meningkatkan kegiatan promosi untuk menjaring calon mahasiswa baru, bekerjasama dengan para alumni melalui media cetak dan elektronik.
12. Meningkatkan status akreditasi Program Studi PPKn untuk mengoptimalkan kepercayaan masyarakat.

13. Mengembangkan program kewirausahaan kepada mahasiswa agar memiliki keterampilan dalam mengimplementasikan sehingga para lulusan memiliki daya saing yang tinggi.
14. Mengembangkan program pembentukan softskill mahasiswa, agar memiliki pemahaman dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai APIK Unggul (Widodo, 2019).

KESIMPULAN

Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta dilandasi dengan berbagai kebijakan pemerintah, konsorsium, serta penciri Program Studi. Penyusunan kurikulum dimulai dengan menganalisis body of knowledge Prodi PPKn, pembuatan Capaian Pembelajaran Program Studi, menganalisis keterkaitan dengan 4 pilar Unesco, Bahan Kajian, Matrik Kurikulum, pembagian mata kuliah, bobot mata kuliah, sajian mata kuliah, dan softskill. Sejumlah penyesuaian kurikulum tidak hanya pada cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran tetapi juga pada tujuan, isi dan bahan pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, M. N., & Najicha, F. U. (2022). Urgensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Kalangan Mahasiswa pada Zaman Millennial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1345–1351.
- Arizka, S. (2020). Concept of Civic Education and its Realization in Various Countries. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 29–38.
- Bahrudin, F. A. (2019). Implementasi Kompetensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 2(2), 184–200.
- Balogun, I. N., & Yusuf, A. (2019). Teaching Civic Education to Learners through Best Practices. *Anatolian Journal of Education*, 4(1), 39–48.
- Bergersen, A., & Muleya, G. (2019). Zambian Civic Education Teacher Students in Norway for a Year-How do They Describe Their Transformative Learning? *Sustainability (Switzerland)*, 11(24), 1–17
- Bessant, J., Farthing, R., & Watts, R. (2016). Co-Designing a Civics Curriculum: Young People, Democratic Deficit and Political Renewal in the EU. *Journal of Curriculum Studies*, 48(2), 271–289.
- Campbell, D. E. (2019). What Social Scientists Have Learned About Civic Education: A Review of the Literature. *Peabody Journal of Education*, 94(1), 32–47.
- Dewi, R. R., Suresman, E., & Mustikasari, L. (2020). Implementasi Kebijakan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi. *Eduksos : Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 9(1), 1–15.
- Gladu, J. (2013). Living A Cosmopolitan Curriculum: Civic Education, Digital Citizenship, and Urban Priority Schools. *NBER Working Papers*, 89.
- Kaumba, C., Kabombwe, M. Y., & Mwanza, C. (2020). Civic Competences: What does an Outcomes-Based Curriculum Mean for a Civic Education Reacher in Zambia. *International Journal of Education and Research*, 8(6), 87–104.
- Komara, E. (2017). Curriculum and Civic Education Teaching in Indonesia. *EDUCARE: International Journal for Educational Studies*, 10(1), 23–32.
- Masnun, M. A., & Pratama, R. N. (2020). Disharmoni Dalam Pengaturan Kurikulum, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 10(2), 9–18.
- Mofoluwawo, E. (2018). Civic Education: An Antidote for Promoting a Corrupt Free Society in Africa. *Nigerian Journal of Social Studies*, 27(4), 242–251.

- Muleya, G. (2018). Re-examining the Concept of Civic Education. *Journal of Lexicography and Terminology*, 2(2), 25–42.
- Mutale Mulenga, I., & Ng'andu, M. (2022). Civic Education Teaching Resources and Teacher Preparedness for Secondary School Competency-Based Curriculum in Lusaka, Zambia. *East African Journal of Education and Social Sciences*, 3(2), 166–177.
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2020). Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen*, 9(2), 10–23.
- Nugraha, P. P. (2021). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Menumbuhkan Jati Diri Bangsa. *Edutainment: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, 9(1), 31–38.
- Nurdin, E. S. (2015). The Policies on Civic Education in Developing National Character in Indonesia. *International Education Studies*, 8(8), 199–209.
- Nurdin, E. S. (2016). Analisis Konten Dimensi Implementasi Kebijakan Publik pada Konten Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Sosiohumanika*, 9(1), 11–30.
- Rachman, F., Nurgiansah, T. H., & Kabatiah, M. (2021). Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2970–2984.
- Rachman, F., Ryan, T., Kabatiah, M., Batubara, A., Pratama, F. F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Pelaksanaan Kurikulum PPKn pada Kondisi Khusus Pandemi Covid-19. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5682–5691.
- Raharjo, R. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 63.
- Santoso, G. (2020). The structure development model of pancasila education (Pe) and civic education (ce) at 21 century 4.0 era in indonesian. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 59, 1046–1054.
- Santoso, G. (2021a). Civic Education Based on 21st Century Skills in Philosophical, Theoretical and Futurist Resolution Dimensions at Muhammadiyah University of Jakarta:(UMJ). *World Journal of Business Research*, 1(2), 103–113.
- Santoso, G. (2021b). Model Analysis (SWOT) of Curriculum Development from Civic Education At 21 Century, 4.0 Era In Indonesian. *IJEBD (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, 4(2), 250–256.
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., Sapriya, & Murod, M. (2023). Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Melalui Kajian Filosofis Pembukaan UUD 1945 di Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 2(1), 297–311.
- Suwardi. (2022). Analisis dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran PPKn di SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. *Ensiklopedia Education Review*, 4(2), 80–91.
- Widodo, S. T. (2019). Inovasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi dan Sekolah Dasar dalam Menghadapi Tantangan Era Disrupsi. *Jurnal Proresif*, 3(7), 1–11.